

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 telah mengeluarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bantul. Berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Yogyakarta, 2018).

**Gambar 1. 1 Pemeriksaan LKPD untuk Tahun Anggaran 2015 s.d 2018
di Wilayah D.I. Yogyakarta**

No	Entitas	Tahun	Opini	No	Entitas	Tahun	Opini
1	Provinsi DIY	2016	WTP	1	Provinsi DIY	2018	WTP
2	Kabupaten Bantul		WTP	2	Kabupaten Bantul		WTP
3	Kabupaten Gunung Kidul		WDP	3	Kabupaten Gunung Kidul		WDP
4	Kabupaten Kulon Progo		WTP	4	Kabupaten Kulon Progo		WTP
5	Kabupaten Sleman		WTP	5	Kabupaten Sleman		WTP
6	Kota Yogyakarta		WTP	6	Kota Yogyakarta		WTP
No	Entitas	Tahun	Opini	No	Entitas	Tahun	Opini
1	Provinsi DIY	2017	WTP	1	Provinsi DIY	2019	WTP
2	Kabupaten Bantul		WTP	2	Kabupaten Bantul		WTP
3	Kabupaten Gunung Kidul		WDP	3	Kabupaten Gunung Kidul		WTP
4	Kabupaten Kulon Progo		WTP	4	Kabupaten Kulon Progo		WTP
5	Kabupaten Sleman		WTP	5	Kabupaten Sleman		WTP
6	Kota Yogyakarta		WTP	6	Kota Yogyakarta		WTP

Sumber : Yogyakarta bpk.go.id

Gambar 1. 2 Tren Opini LKPD Wilayah D.I. Yogyakarta



Sumber : Yogyakarta bpk.go.id

Dari pemeriksaan tersebut LKPD kabupaten bantul mendapat opini atas laporan keuangan Wajar tanpa Pengecualian (WTP) namun, ada beberapa

pokok hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten bantul yang mendapat perhatian diantaranya pada Sistem Pengendalian Internal, BPK menemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan ada 5 temuan yang harus di perbaiki. Lalu pada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara ada 3 temuan yang harus diperbaiki. Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, salah satunya di pemerintah daerah kabupaten bantul karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerahnya masih rendah. Hal tersebut dikemukakan di tahun 2017 pada saat penyampaian LHP BPK atas laporan keuangan bantul sekretaris daerah (SEKDA) bantul mengatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menemukan adanya 13 temuan, meliputi SPI dengan 6 temuan dan kepatuhan dengan 7 temuan.

Meski ada beberapa temuan yang perlu dikoreksi, namun dampak dari permasalahan tersebut hanya berdampak kecil terhadap kewajaran laporan keuangan. Pencapaian ini dapat memotivasi aparatur sipil negara untuk membuktikan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan. Kontribusi penelitian ini menambahkan variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pengawasan Internal, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi pada bagian variabel independen, menambahkan teori agensi, *theory stewardship* dan teori kepatuhan, serta

menambahkan sampel yang masih kurang representatif. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan di tahun 2020 di kota Yogyakarta pada Dinas Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul dengan menggunakan variabel yang disarankan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016), menggunakan variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal dari penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali hasil yang tidak konsisten terkait variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah oleh penelitian Sholohah dkk (2019) yang menunjukkan hasil Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun pada penelitian Sholikhah dkk (2016), Muda dkk (2018) dan Lestari dan Dewi (2020) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Terdapat juga variabel Pengawasan Internal oleh penelitian Muda dkk (2018) dan Mawuntu dkk (2020) yang menunjukkan Pengawasan Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi berbeda dengan penelitian Sholohah dkk (2019), Modo dkk (2019), Sholikhah dkk (2016), Saifudin dan Aprilia (2016), Mardinan dkk (2018), dan Widaryani dan Kiswanto (2019), serta Lestari dan Dewi (2020) yang menunjukkan bahwa Pengawasan Internal mempengaruhi kualitas laporan

keuangan. Lalu variabel Gaya Kepemimpinan oleh penelitian Sari (2017) yang menunjukkan Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi berbeda dengan penelitian Mardinan dkk (2018) dan Herniyasa dkk (2014) yang menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun Komitmen Organisasi oleh penelitian Saifudin dan Aprilia (2016) dan Widaryani dan Kiswanto (2019) yang menunjukkan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun berbeda dengan penelitian Modo dkk (2019) dan Pratama dan Yahya (2019) yang menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah salah satu bentuk dinamika pembangunan sektor publik. Tuntutan dari masyarakat telah membuat pemerintah pusat & daerah menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas untuk pelaksanaan tata kelola yang baik. Bahwa semua kegiatan pertanggungjawaban pemegang amanah (pemerintah) kepada wali (rakyat) disebut hitungan di sektor publik. Al-Quran menjelaskan bahwa dalam melakukan pekerjaan harus amanah dan dapat di percaya. Amanah artinya dipercaya, yang merupakan akar dari kata iman. Esensi kepercayaan memang bersumber dari kekuatan keyakinan, semakin menipisnya keyakinan maka kepercayaan pada diri sendiri pun akan berkurang. Ada hubungan yang sangat erat antara keduanya, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا بِعِظَتِكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa : 58)

Surat Q.S An-Nisa ayat 58 menerangkan bahwa amanah adalah menyimpan simpanan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk aslinya. Misi Amanah meliputi banyak hal, yaitu: menjaga rahasia orang, menjaga kehormatan orang lain, melindungi diri, menyelesaikan distribusi kepada mereka dan tugas orang lain. Alquran menyebut tugas yang diberikan Allah SWT kepada manusia sebagai amanah (amanah taklif). Amanah taklif adalah yang paling berat. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, lautan, dan makhluk besar lainnya milik Allah SWT tidak dapat membawanya. Maka dari itu kita sebagai para akuntan ataupun para pekerja harus bekerja sesuai amanah dan membuat laporan keuangan sesuai dengan transaksinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan/ akuntabilitasnya dapat di percaya.

Salah satu akun kewajiban pemerintah daerah adalah membuat keuangan laporan (LK) (Widaryani dan Kiswanto, 2019). Dengan berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia, sudah menjadi kebutuhan umum bagi masyarakat untuk bertanggung jawab atas kinerja pemerintah. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah

adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Saifudin dan Aprilia, 2016). Ini akan menilai seberapa baik pemerintah telah mencapai hasil selama periode tahun anggaran. Untuk mengevaluasi pencapaian ini diperlukan beberapa informasi.

Salah satunya adalah informasi keuangan. Dalam kinerja pemerintah, pelaporan keuangan sangat penting dan diperlukan untuk memperoleh informasi tentang status keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tidak hanya disiapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah (seperti pemerintah provinsi, kota / kabupaten atau semua instansi termasuk instansi dan lembaga) juga harus menyusun laporan keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 31 (1) Keuangan Negara, disebutkan bahwa laporan keuangan sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah. Secara khusus pada pasal dan ayat di atas, Gubernur / Bupati / Walikota bertanggung jawab kepada DPRD atas pelaksanaan APBD melalui laporan keuangan yang telah direview oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) (Frasca Ardy Nugroho, 2019).

Sebagai pengelola dana publik, pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan, yang mengharuskan mereka memiliki sistem informasi yang andal. Pelaporan keuangan merupakan media dimana suatu entitas (dalam hal ini pemerintah) bertanggung jawab atas kinerja keuangan masyarakat. Pemerintah harus mampu menyediakan laporan keuangan yang memuat informasi keuangan berkualitas tinggi (Frasca Ardy Nugroho, 2019).

Bagi pemerintah daerah, laporan keuangan berkualitas tinggi harus disiapkan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintah) yang merupakan laporan keuangan yang dapat dipergunakan oleh pengguna ataupun pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial ataupun politik dan menilai akuntabilitas. Dikarenakan kualitas LKPD menggambarkan kedisiplinan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam hal ketertiban administrasi dan kepatuhan (Sholohah dkk, 2019).

Dalam Q.S An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Sungguh, Allah memerintahkan (Anda) untuk bersikap adil, berbuat baik, berbakti kepada kerabat, dan Allah melarang tindakan kebencian, kejahatan dan kebencian. Dia mengajari Anda agar Anda bisa mengambil pelajaran.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan. Karakter yang adil dan benar sangat penting bagi akuntan untuk menjalankan tugasnya. Keadilan bahkan menjadi prinsip dalam akuntansi Islam. Keadilan menggantikan tempatnya. Kebalikan dari keadilan itu ialah kezhaliman. Prinsip kejujuran laporan keuangan juga terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَّةَ الْأُولَى (184)

Artinya : *”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”*

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Dr. Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Dalam beberapa kasus, akuntansi menjadi salah satu hambatan teknis bagi manajemen senior untuk mengelola keuangan daerah. Syahrida (2009) mengatakan bahwa akuntansi merupakan salah satu dari permasalahan yang ada di pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing unit dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terperinci dan teliti agar permasalahan akuntansi dapat terselesaikan dengan baik sehingga dapat mencerminkan informasi keuangan secara utuh.

Mardiasmo (2004) menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan yang bagus dapat membuat sistem akuntabilitas keuangan di suatu organisasi berfungsi dengan baik. Artinya, di dalam APBD pengelolaan keuangan daerah mempunyai letak yang strategis untuk menghasilkan pengelolaan tanggung jawab pemerintah. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang harus diawasi, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang cukup dalam bentuk laporan keuangan yang dapat

dipahami oleh pengguna, pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh orang ataupun pengawas yang menguasai di bidang keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi khususnya akuntansi keuangan daerah.

Faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan ialah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah. Masih banyak pegawai di bagian keuangan yang berlatar belakang non keuangan mengakibatkan kurangnya pemahaman / penguasaan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar. Dikarenakan sistem akuntansi merupakan salah satu aspek dasar penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Seperti halnya pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah, ialah dalam hal bertanggung jawab atas pelaksanaan APBD, rangkaian mekanismenya mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, ringkasan hingga pelaporan keuangan, dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No.59 2007). Penerapan sistem akuntansi ini merupakan suatu mekanisme, prosedur kerja dan alat kendali dalam pengelolaan keuangan (Sholikhah dkk, 2016).

Faktor kedua yang meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah pengawasan internal. Pengawasan internal merupakan bagian dari kegiatan pengendalian intern, dan fungsinya adalah melakukan penilaian secara independen terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi instansi pemerintah (Modo dkk, 2019). Pengawasan adalah pekerjaan sistematis yang bertujuan menetapkan standar untuk sistem upaya balik informasi, membandingkan kinerja yang sebenarnya terjadi dengan standar yang telah

ditetapkan, menentukan apakah terjadi penyelewengan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya dalam mencapai perusahaan atau pemerintah tujuannya adalah untuk menggunakan perusahaan atau pemerintah seefektif mungkin. Tujuan utama pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengawasan dapat digunakan untuk perbaikan yang diperlukan guna memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintah (Yosa, 2010). Menurut hasil penelitian Sholikhah dkk (2016) apabila pengawasan internal meningkat, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah gaya kepemimpinan. Pimpinan dituntut untuk memberi contoh, dapat memotivasi, sebagai pemecah masalah (*breaker / finisher problem*) dan sebagai pengatur / pemeriksa atas pelaksanaan tanggung jawab yang diemban oleh karyawan yang menjadi bawahannya, atau dengan kata lain seorang pemimpin harus memiliki kemampuan manajemen organisasi baik dalam aspek manajemen ketenagakerjaan maupun aspek manajemen sumber daya manusia. Di sini, peran dan beban dipikul oleh seseorang pimpinan itu jika tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya maka visi dan misi lembaga bahkan program pemerintah tidak akan tercapai seperti yang diharapkan (Saifudin dan Aprilia, 2016). Menurut hasil penelitian Herniyasa dkk (2014) memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan atasan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan. Keluaran laporan keuangan yang berkualitas tidak terlepas dari dukungan kinerja dan tingkah laku karyawan. Terkait tingkah laku karyawan dengan komitmen organisasi untuk memberikan hasil kinerja yang baik dan kemampuan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas tinggi (Agung dan Gayatri, 2018).

Faktor keempat yang meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan adalah komitmen organisasi, dalam hal ini komitmen pemerintah daerah adalah kesediaan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan perbaikan sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Adanya komitmen organisasi akan menjaga kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah yang andal. Hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan kualitas informasi laporan keuangan. Komitmen organisasi dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Komitmen organisasi merupakan keinginan yang kuat untuk mengikuti arah dan tujuan organisasi sebagai anggota organisasi. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Frasca Ardy Nugroho, 2019). Zeyn (2011) menyatakan pembentukan mekanisme tata kelola yang baik akan meningkatkan kesadaran pemerintah akan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, ditambah dengan kemampuan pegawai dan komitmen tinggi organisasi dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan mematuhi peraturan yang berlaku, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian yang diangkat peneliti adalah pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pengawasan internal, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasar latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
- b. Apakah pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
- c. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- d. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah ?

C. Motivasi Penelitian

Ingin meneliti kembali penelitian yang tidak konsisten terkait variabel pemahaman sistem akuntansi, pengawasan internal, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi yang tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti yang sudah terpaparkan di latar belakang. Dan adanya keterbatasan terhadap jumlah

sampel yang masih sedikit dan kurang representatif. Diharapkan setelah diteliti kembali dapat menunjukkan konsistensi dari hasil penelitian dengan jumlah sampel yang memadai serta dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dari variabel-variabel tersebut dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai peneliti :

- a. Untuk menguji secara empiris bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Untuk menguji secara empiris bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Untuk menguji secara empiris bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- d. Untuk menguji secara empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

- a. Bagi Akademisi

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat memberikan pemikiran serta wawasan tentang konsep pengaruh pemahaman sistem akuntansi, pengawasan internal, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bantul. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Praktisi

Melalui penelitian ini diharapkan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dan orang-orang yang bersangkutan dalam pembuat kebijakan pada umumnya memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan ataupun gambaran tentang hal yang mempengaruhi dalam pemerintahan yang berkaitan dengan laporan keuangan dengan adanya pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang baik, pengawasan internal, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi yang baik. Secara praktis, diharapkan penelitian ini membawa manfaat kepada pembuat kebijakan dan pengambil keputusan untuk memperbaiki beberapa faktor yang menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurun.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan

pemerintah daerah, pengawasan internal, gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.